

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN

**Salman Habeahan**

Direktur Pendidikan Katolik Kementerian Agama R.I. Anggota Dewan Pakar Gerakan Pembumian Pancasila  
Anggota Dewan Pakar Gerakan Pembumian Pancasila  
Pengajar tidak tetap pada Institut Bisnis Nusantara Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur  
Jakarta

### **Pengantar**

Pemilu Presiden dan pemilu kepala daerah secara serentak yang baru saja berlangsung pada tahun 2024 ini dengan penuh dinamika dan menghabiskan *resources* yang sangat besar, kita disadarkan akan pentingnya memilih pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat dan hebat selaras dengan arah dan tujuan pembangunan Indonesia merdeka, maju dan sejahtera. Kita sebagai sebuah bangsa menyadari peran pemimpin dalam mentransformasi kehidupan bernegara sangat penting dan strategis. Beberapa contoh pemimpin; Deng Xiaoping, Lee Kuan Yew, Ir. Soekarno dan Ronald Reagan yang mampu mengubah negara mereka masing-masing melalui kebijakan visioner, ideologis dan kepemimpinan yang kuat dan tegas.

Masyarakat Indonesia mendambakan seorang sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari berbagai persoalan kebangsaan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia; adil, makmur, damai dan sejahtera melalui kepemimpinan Pancasila; implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan.

Meski Indonesia hamper 80 tahun Merdeka, kita masih harus berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan; mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan social, kesejahteraan rakyat dan menjaga ketertiban dunia. Sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, sangat diharapkan munculnya sosok kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila adalah model kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai kemampuan mengarahkan dan mengelola bangsa dan negara, tetapi juga membumikan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa

bangsa. Model kepemimpinan ini relevan untuk mengelola kehidupan masyarakat yang berketuhanan, humanis, berkebhinekaan, demokratis, dan berkeadilan sosial.

## **1. Kepemimpinan Pancasila**

### **2.1. Pengertian Kepemimpinan Pancasila**

Kepemimpinan Pancasila adalah konsep kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam praktik pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan Pancasila menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai visi, dasar, dalam kepemimpinannya, dimana seorang pemimpin diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, manusiawi, altruistik, demokratis, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan Pancasila merupakan kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai tata nilai, pedoman dalam mengelola kehidupan ditengah masyarakat, dalam hidup bernegara, serta bermasyarakat. Setiap sila Pancasila menjadi panduan moral, etis, dan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman dalam mengatur dan memimpin kehidupan berbangsa; bernegara, dan bermasyarakat.

Model kepemimpinan Pancasila memiliki beberapa ciri antara lain: memiliki integritas yang tinggi, jujur, amanah dan bertanggung jawab, berorientasi serta mengarusutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Model kepemimpinan Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks tetapi juga pedoman bagi pemimpin yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

### **2.2. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kepemimpinan**

Meskipun nilai-nilai Pancasila sudah disepakati menjadi pedoman, dasar, falsafah atau ideologi bangsa, namun dalam kenyataannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa masih jauh dari harapan dan kenyataan. Perjalanan kehidupan

berbangsa dan bernegara kita hingga saat ini masih diwarnai keprihatinan, seperti pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Pancasila. Merosotnya moralitas, kekerasan, radikalisme, nepotisme, kesewenangan, korupsi dan sebagainya selalu saja muncul menjadi kekuatan yang merusak harmoni dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesenjangan sosial pun semakin melebar, dimana angka kemiskinan pun cenderung bertambah seperti persoalan kemiskinan ekstrim dan stunting. Ini sebuah pertanda bahwa pemimpin belum berhasil mengimplementasikan kepemimpinan Pancasila, yakni nilai keadilan social dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan masih tumbuhnya radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman terhadap persatuan dan kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia.

Model kepemimpinan Pancasila penting dan harus didorong dengan mengimplementasikan terus menerus nilai-nilai dari lima sila Pancasila dalam praktek kepemimpinan para pemimpin di republik ini. Para pemimpin bangsa di negeri ini baik pusat dan daerah diharapkan dapat menjadi role model dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur kelima sila Pancasila menjadi system nilai dan norma yang dihidupi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila memberikan panduan moral, etis, dan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin pemerintahan dan partai politik.

### **3. Kepemimpinan Berlandaskan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Semua agama memandang dan mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah wakil Tuhan di dunia. Jabatan seorang pemimpin adalah titipan, dan amanah dari Tuhan. Jabatan itu adalah sarana pelayanan bagi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memuliakan Tuhan dan mensejahterakan hidup manusia. Kepemimpinan berdasarkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna sebagaimana yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia. Dalam perspektif sila pertama Pancasila tersebut, seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kecerdasan spiritual, moral, dan etika yang hendaknya dihidupi dan dihayati oleh seorang pemimpin.

Kepemimpinan berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sesuatu yang harus dikejar melainkan harus dilaksanakan dalam perspektif sebagai panggilan suci,

menjadi wakil Allah di dunia ini. Setiap rencana, keputusan, tindakan, dan kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin selalu dilandasi oleh prinsip relasinya sebagai wakil Tuhan. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa tanggung jawab utamanya bukan hanya kepada rakyat yang dipimpin, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jabatan kepemimpinannya harus dijalankan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama.

Seorang pemimpin yang berlandaskan kepemimpinannya pada sila pertama menekankan pentingnya integritas diri, memiliki akhlak mulia dan kejujuran. Pemimpin harus menjadi teladan dalam perilaku dan tindakan, menjaga kewibawaan dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela, bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan moral keagamaan yang dianutnya.

Seorang pemimpin dalam perspektif sila pertama Pancasila memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama dan menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis; tidak berpihak pada satu agama saja, tetapi menghormati dan melindungi hak setiap warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya (UUD 1945, Psl. 29). Seorang pemimpin harus memiliki kesadaran untuk melayani agar setiap warganya dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seorang pemimpin harus memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjauhi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kepemimpinan berdasarkan sila pertama Pancasila diarahkan untuk melayani rakyat dengan tulus dan penuh hikmah demi kepentingan seluruh rakyat.

Kepemimpinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melahirkan pemimpin yang heroic; memiliki spiritualitas kasih sayang, empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama yang tertinggal. Dan pemimpin yang demikian berani menyangkal dirinya, mengorbankan hidupnya untuk rakyat yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan ajaran setiap agama yang mengajarkan cinta kasih dan keadilan Tuhan. Dengan demikian, kepemimpinan yang berlandaskan sila pertama Pancasila mencerminkan kepemimpinan yang berkarakter mulia, yang mempersembahkan seluruh diri dan profesinya untuk kemaslahatan rakyat

yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip ini akan mampu membawa kedamaian, kejujuran, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

#### **4. Kepemimpinan Berlandaskan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Kepemimpinan berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” mengandung makna bahwa seorang pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki karakter hormat terhadap harkat martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, senantiasa memperjuangkan keadilan, dan keadaban publik, serta berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai sila kedua Pancasila ini menuntut seorang pemimpin sebagai pribadi yang humanis, yang memperlakukan semua orang sebagai sesama yang bermartabat mulia; yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta berperku adil. Hal itu tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang tidak diskriminatif; memperhatikan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Bersikap adil dalam setiap kebijakan dan keputusan bukan hanya berarti memberikan apa yang menjadi hak warganya tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan situasi khusus setiap individu atau kelompok sesuai dengan kekhasan dan identitas mereka agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan yang beradab artinya kepemimpinan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma, budaya, adat istiadat, etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pemimpin dalam perspektif sila kedua Pancasila menuntut seorang pemimpin untuk memiliki semangat solidaritas yang tinggi, peka terhadap kebutuhan mereka yang menderita dan terpinggirkan, mengutamakan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Seorang pemimpin menurut sila kedua Pancasila adalah seorang pejuang hak asasi manusia. Ia wajib melindungi hak-hak dasar warganya dalam berbagai aspek, seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menumbuhkan kehidupan yang semakin beradab serta dapat membangun keadaban public ditengah masyarakat. Implementasi kepemimpinan Pancasila berdasarkan sila kedua ini hendaklah melahirkan kebijakan-

kebijakan yang berkeadilan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tidak berpihak pada golongan tertentu.

Kepemimpinan yang Pancasilais menurut sila kedua ini harus berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang dan sejahtera. Dan seorang pemimpin tidak memimpin dengan tangan bengis kekuasaan, tetapi dengan hati nurani dan tanggung jawab social untuk memastikan bahwa setiap manusia diperlakukan dengan manusiawi, adil, dan beradab. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi dasar penting bagi seorang pemimpin dalam memperlakukan setiap warga negara secara adil, bermartabat, serta menghargai hak asasi manusia.

## **5. Kepemimpinan Berlandaskan Sila Persatuan Indonesia**

Kepemimpinan Pancasila Berdasarkan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pemimpin dengan prinsip ini akan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin akan lebih bertindak sebagai bapa dan guru bangsa yang mengayomi semua anak-anaknya dengan jiwa persaudaraan dan kerukunan yang tinggi.

Seorang pemimpin Pancasila senantiasa menjaga keutuhan dan harmoni sosial. Artinya ia harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan. Ia berperan sebagai perekat bangsa dengan memastikan tidak ada diskriminasi atau pengkotak-kotakan berdasarkan perbedaan identitas yang plural. Pemimpin ini bekerja untuk menjaga keutuhan bangsa; kerukunan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan yang berpijak pada sila Persatuan Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional, bersama dan menjauhkan ego sektoral atau golongan tertentu; suku, agama, budaya, dan partainya. Dalam pengambilan Keputusan dan membuat sebuah kebijakan pembangunan, ia senantiasa mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Masyarakat, mengutamakan keutuhan bangsa dan negara. Pemimpin Pancasila memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Menghargai Kebhinekaan, dengan demikian,

ia menghargai perbedaan dan melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan atau ancaman. Melalui sikap penghargaan, toleransi dan inklusivitas, seorang pemimpin pancasilais mampu mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis; rukun dan damai sebagai modal social yang tinggi dalam melaksanakan Pembangunan bangsa.

Kepemimpinan yang berdasarkan sila Persatuan Indonesia adalah kepemimpinan yang menginspirasi rasa nasionalisme. Kepemimpinan sesuai dengan sila ketiga ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan dalam diri rakyat. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai teladan atau *role model* dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, seperti menghormati simbol-simbol negara dan menjaga persatuan di tengah keragaman dan tantangan globalisasi. Pemimpin Pancasilais mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Ia senantiasa berusaha untuk membangun komunikasi yang terbuka untuk mencapai kesepahaman bersama. Kerjasama dan kolaborasi lintas kelompok menjadi kunci keberhasilan kepemimpinannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang berlandaskan sila Persatuan Indonesia adalah pemimpin yang mampu merawat dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, mampu membangun kohesi social ditengah keragaman dan meskipun dihadapkan pada perbedaan. Kepemimpinan ini membawa visi untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan harmonis sehingga masyarakat dapat menghayati semangat Bhineka Tunggal Ika, dan bersatu dalam keberbedaan (*Unity in Diversity*).

Kepemimpinan Pancasila menurut sila ketiga ini mengharapkan dalam diri pemimpin terbentuk jiwa nasionalisme dan patriotism yang tinggi, menghormati keberagaman dan berkomitmen menjaga persatuan, bijaksana dan visioner, dan mampu melihat jauh ke depan tanpa melupakan akar budaya bangsanya. Kepemimpinan Pancasila, akan melahirkan seorang pemimpin yang memperjuangkan kesetaraan atau egaliter, menjalankan kepemimpinannya dengan pendekatan keadilan sosial dan menghargai, merayakan bahkan mensyukuri perbedaan dan kekhasan setiap individu, ras, suku dan agama. Pemimpin berdasarkan sila persatuan Indonesia memiliki semangat dalam membangun multikulturalisme. Dan dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin harus menjunjung

tinggi persatuan dalam keberagaman, bukan keberagaman dalam persatuan. Kepemimpinan yang Pancasilais tidak boleh memandang perbedaan agama, suku, budaya, atau golongan sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dirayakan dalam kehidupan bersama Masyarakat.

## **6. Kepemimpinan Berlandaskan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan**

### **dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Kepemimpinan Pancasila berdasarkan sila ke-4 menuntut seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Pemimpin Pancasila berdasarkan sila keempat mencerminkan kekuasaan diorientasikan pada tanggung jawab pelayanan demi kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya.

Kepemimpinan dalam perspektif sila IV menekankan pentingnya kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah, bukan kepemimpinan yang otoriter, apalagi kepemimpinan yang sewenang-wenang. Musyawarah dan perwakilan menjadi dua elemen penting dalam kepemimpinan ini, yang berfungsi untuk menciptakan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Nilai-nilai Kepemimpinan Pancasila Berdasarkan Sila Ke-4, ini berupaya selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan semacam ini menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi dimana keputusan diambil melalui partisipasi masyarakat dengan cara musyawarah dan perwakilan. Pemimpin tidak bertindak otoriter, tetapi mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dengan kata lain kepemimpinan sila IV yang dijalankan adalah kepemimpinan yang partisipatif, dimana pemimpin mengutamakan musyawarah dan mufakat, melibatkan setiap komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan tidak memaksakan kehendak. Dan nilai tertinggi dari setiap Keputusan pemimpin Pancasila sila IV dalam kepentingan umum (*bonum commune*).

Dalam proses melibatkan rakyat, pemimpin sesuai sila IV akan menjalankan kekuasaan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Bagi pemimpin, sistem perwakilan dipandang menjadi sarana penyampaian aspirasi rakyat. Seorang pemimpin menghormati

wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan menggunakan hasil musyawarah mereka untuk merumuskan kebijakan publik. Dan mengutamakan kepentingan rakyat merupakan pilihan utama dan semangat bagi seorang pemimpin pancasilais, bukan pemimpin mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Maka setiap kebijakan yang dibuat harus mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kepemimpinan Pancasila dari sila keempat ini mengharapkan akan lahirnya seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh hikmat, yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan, seperti keadilan, keseimbangan, dan kepentingan bersama. Hikmat kebijaksanaan selalu mewarnai dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola yang dijalankan pada kekuasaan dan jabatan yang diembannya.

Ciri-ciri Kepemimpinan Pancasila dalam Sila Ke-4 ini adil dan tidak diskriminatif. Pemimpin diharapkan bersikap adil tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, menghormati pendapat orang lain mesti harus berbeda. Pemimpin bersedia mendengar dan menghargai pendapat serta kritik dari berbagai pihak, dan menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Kepemimpinan dilakukan dengan keterbukaan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Pemimpin Pancasilais sila keempat akan mampu membangun kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial, dimana pemimpin mengutamakan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat, bukan keputusan sepihak.

## **7. Kepemimpinan Berlandaskan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Kepemimpinan Pancasila Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki makna yang mengamanatkan seorang Pemimpin harus memastikan keadilan di semua aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial. Penghapusan Ketimpangan: kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, desa dan kota, serta kelompok mayoritas dan minoritas. Pemimpin harus mewujudkan kesejahteraan rakyat

tanpa diskriminasi. Hak dan Kewajiban: Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Ciri Kepemimpinan Pancasila dalam Sila Keadilan Sosial, memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: berorientasi pada kesejahteraan rakyat: mengutamakan kepentingan rakyat dengan program-program yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemimpin tidak bertindak diskriminatif: bersikap adil terhadap semua golongan tanpa memandang suku, agama, ras, atau status ekonomi. Pemimpin Pancasila sila kelima berpihak pada yang lemah: memperhatikan kelompok marginal, miskin, dan tertinggal untuk mencapai pemerataan keadilan.

Kepemimpinan Pancasila dalam sila kelima, akan mencerminkan Kebijakan yang Adil: Menetapkan kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Ia akan mampu menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Dimana sang pemimpin harus amanah, transparan, dan bebas dari perilaku koruptif. Sebagai contoh; implementasi kepemimpinan Pancasila dalam Keadilan Sosial, Bidang Ekonomi: Pemimpin memastikan distribusi ekonomi yang merata, pemberdayaan UMKM, dan pemerataan pembangunan antara kota dan desa. Bidang Pendidikan: Mendorong akses pendidikan yang setara/merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat, termasuk di daerah terpencil. Dalam bidang kesehatan: menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dan dalam Bidang Hukum: Pemimpin memastikan keadilan hukum tanpa tebang pilih, serta mengutamakan perlindungan hak-hak rakyat kecil. Kebijakan Sosial: Membangun program sosial seperti bantuan langsung, subsidi, dan jaminan sosial bagi kelompok kurang mampu.

Contoh-contoh Kepemimpinan Pancasila dalam Sila Keadilan Sosial; seperti pemimpin daerah yang memberi perhatian untuk membangun infrastruktur desa agar tidak tertinggal dari kota. Kepala negara atau pejabat yang memprioritaskan kebijakan pro-rakyat, seperti program bantuan sosial dan perlindungan petani. Kepemimpinan Pancasila akan melahirkan pemimpin yang berani memberantas korupsi dan memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Kepemimpinan Pancasila yang berlandaskan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menuntut pemimpin untuk bekerja secara adil, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin harus memastikan

pemerataan di segala bidang kehidupan dan berkomitmen menghapus ketimpangan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kehidupan yang adil, layak dan sejahtera.

## **8. Penutup**

Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemimpin Pancasila memiliki karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai kelima sila Pancasila; menyadari diri sebagai bangsa yang religious, ber-Ketuhanan dan berperikemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menghargai perbedaan, hidup dalam persaudaraan, persatuan dalam keberbedaan, bersikap demokratis, adil, bijaksana, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pemimpin Pancasila menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, dimana sang pemimpin harus menunjukkan perilaku yang etis, beradab, dan bermoral. Dengan demikian, ia akan menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Dan pemimpin yang Pancasila akan mengutamakan dialog dan musyawarah, dan dalam menyelesaikan masalah, pemimpin mengedepankan dialog dan musyawarah yang menjunjung nilai kemanusiaan, menghargai pendapat orang lain, dan mencari solusi yang adil.

Kepemimpinan Pancasila menghormati hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berpendapat, hak mendapatkan keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Seorang pemimpin yang menghayati nilai-nilai dasar Pancasila berani menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, atau kekerasan dalam kepemimpinan. Salah satu adalah: Seorang pemimpin memastikan kebebasan anggotanya dalam menyampaikan pendapat secara demokratis dan terbuka. Pemimpinan menjalankan kepemimpinan dengan integritas, kesantunan, dan rasa hormat. Menghindari sikap arogan, otoriter, dan tindakan yang melukai harkat dan martabat manusia.

Nilai-Nilai Kepemimpinan Pancasila bertindak tanpa diskriminasi dan berpihak pada kebenaran. Ia menghormati harkat, martabat, dan hak dasar manusia. Mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan. Ia mengutamakan sikap sopan dan beretika dalam kepemimpinan.

Sosok Pemimpin Sejarah: Ir. Soekarno yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan hak kemanusiaan dalam perjuangan kemerdekaan, pemimpin yang mendukung kebijakan perlindungan HAM, peduli terhadap kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang.

Indonesia membutuhkan Kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan yang mengutamakan keadilan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta perilaku yang beradab dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kepemimpinan yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi semua pihak yang dipimpinnya, pemimpin yang memanusiakan manusia dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakannya. Indonesia akan dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Indonesia emas 2045 jika seluruh pemimpin di negeri ini dapat mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan nasional.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Azra, A. 2008.** Pancasila di Tengah Peradaban Dunia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Lemhanas, Jakarta, 13 November. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2013.
- Azra,A. (2006).** Pancasila dan identitas nasional Indonesia: perspektif multikulturalisme. Dalam restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik identitas dan modenitas. Bogor. Brighten Press Arif, M. (2014).
- Koentjaraningrat. (1982).** Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Meinarno, E. A. Dkk. (2011). Manusia Dalam Kebudayaan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miftah T. 2010.** Kepemimpinan dan Manejemen. Rajawali Press: Jakarta.
- Moerdiono. (1999).** Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat Mustika Zed. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Siswanto S. (2003).** Manjemen tenaga kerja,edisi 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara Soliha, Euis dan **Hersugondo. 2008.** Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi. Fokus Ekonomi (FE), Vol.7, No.2 Hal. 83-93 Suparlan, Pi, (1999), "Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme". Jurnal Studi Amerika, vol.5 Agustus, hal.35-42.
- Timple, A.D. (2000).** Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan .Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Wahjosumidjo. (1999). Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi. (2009).** Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization). Bandung: Alfabeta. Winarno Narmoatmojo.(2010).

Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).  
Yogyakarta:Ombak

**Yamin, Martinis dan Maisah. (2010).**Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Persada Press.  
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.  
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.